BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam memperoleh pijakan dan referensi yang ilmiah untuk penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber literatur yang mirip, dikarenakan dalam studi hubungan internasional, belum banyak yang mengangkat isu diplomasi budaya dan pengaruh terhadap hubungan antar negara, kebanyakan dari peneliti-peneliti lebih banyak meneliti budaya Korea Selatan melalui kacamata komunikasi dan interaksi sosial. Dari sekian banyak karya ilmiah yang peneliti dapatkan, terdapat tiga karya ilmiah yang inti sarinya dapat peneliti ambil. Pertama, yaitu tentang potensi kesenian dalam membangun perekonomian suatu negara. Karya ilmiah tersebut berjudul "*Demam K-Pop (Keberhasilan Pemerintah Korea Selatan Membangun Perekonomian Lewat Seni"* dari jurnal jurusan Hubungan Internasional Universitas Jember karya Triono Akmad Munib.

Dari Jurnal tersebut peneliti yang bersangkutan membahas mengenai fenomena *Hallyu*, kemunculan *K-Pop*, dan upaya pemerintah Korea Selatan menjadikan *K-Pop* sebagai ladang bisnis untuk membangun perekonomian Korea Selatan. Penulis bersangkutan tersebut juga menjadikan *Hallyu* sebagai salah satu contoh fenomena globalisasi.

Jurnal tersebut mengemukakan bahwa negara dituntut oleh fenomena globalisasi untuk melakukan berbagai upaya agar bisa setidaknya bertahan dalam hempasan gelombang globalisasi. Selanjutnya dijelaskan bahwa hanya ada dua cara

hidup di era globalisasi ini, yaitu *be a wave* atau *riding the wave*. Negara dihadapkan kepada dua pilihan yang berat. Apakah negara tersebut "menjadi gelombang" dalam arus globalisasi? Ataukah "mengendarai gelombang" tersebut? Dalam hal "menjadi gelombang", kondisi yang ditunjukkan adalah dengan menggabungkan fenomena dan globalisasi. Sementara, jika kita bisa "mengendarai gelombang", kondisi yang diperlihatkan adalah berada di atas arus globalisasi dan menyetir kemana arah globalisasi.

Globalisasi merujuk pada serangkaian proses sosial multidimensional yang mengkreasikan, menggandakan, menekankan dan mengintesifikasi pertukaran dan ketergantungan sosial di seluruh dunia. Di tengah pertukaran dan saling ketergantungan tersebut, globalisasi menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat dunia untuk memperluas hubungan antara masyarakat yang saling berjauhan. Seperti yang dikemukakan Steger, globalisasi merupakan proses yang multidimensional, yang artinya ketergantungan yang berimplikasi pada intensifikasi hubungan masyarakat dunia tersebut berlangsung di seluruh kehidupan manusia (Steger,2003:13). Dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional, globalisasi berimplikasi pada meningkatnya interdependensi antar negara sehingga akan tercipta hubungan kerjasama yang intens untuk memenuhi kebutuhannya. Bidang Kebudayaan pun tak lepas dari implikasi globalisasi. Ditambah kehadiran teknologi informasi dan komunikasi, kerjasama dibidang *low politic* seperti Bidang Kebudayaan pun dapat mempengaruhi hubungan antara negara. Dengan adanya globalisasi, masyarakat semakin terpengaruh dengan budaya luar dan itu dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan politik ekonomi suatu negara.

Korea Selatan telah dianggap sukses menjadi *be the wave*. Dikarenakan Budaya Korea berhasil menghipnotis telinga dan mata masyarakat di berbagai penjuru dunia, tak terkecuali di Indonesia. Pesona alam, fashion serta artis-artisnya telah menyihir jutaan pemirsa televisi maupun secara langsung ketika mereka sedang diatas panggung. Indonesia benar-benar telah di-"koreakan" oleh *Hallyu* yang didominasi oleh drama serta para band pria dan wanita mulus dengan gaya menyanyinya yang atraktif.

Dunia seakan melupakan kiblat lama, Paris dan Milan sebagai pusat fashion dan gaya hidup. Dunia telah menemukan arah kiblat baru bernama Korea. Bahkan, acara-acara hiburan televisi di Tanah Air juga meniru gaya Korea. Demam *K-Pop* telah mendorong lahirnya sebuah fenomena fanatisme dimana para artis dari Korea tersebut menjadi kiblat dalam berperilaku bagi remaja dan generasi muda di Indonesia. Tidak sedikit dari mereka yang rela menghabiskan uang untuk pergi ke Korea Selatan hanya untuk menonton konser artis idola dan berbelanja pernak-pernik berlabel "*made in Korea*" (http://oase.kompas.com/ read/2011/10/16/03045760/Demam.Korea.Sudah.Menginfeksi.Indonesia diakses pada 6 Jan 2014).

Dari Jurnal tersebut disimpulkan bahwa pemerintah Korea Selatan melihat fenomena globalisasi sebagai peluang untuk memperkaya dan mengembangkan potensi domestik yang dimiliki. Korea menjadi salah satu contoh keberhasilan penyelenggara negara yang mampu menjadikan kreativitas dan budaya penghasil uang yang cukup besar.

Kemudian Berita terbitan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang menurut peneliti cukup mendekati dan menunjang dalam hal penelitian kerjasama bilateral antara Korea Selatan-Indonesia. *"Indonesia-Korea Selatan Semakin Mantapkan Hubungan Diplomatik"* sumber Haning Romdiati (Humas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) berisi bahwa dalam peringatan 40 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Korea Selatan, Korea selatan bersama Indonesia dan ASEAN membuka peluang kerja sama penelitian terkait isu-isu sosial-ekonomi, politik, kependudukan dan budaya. Berita tersebut memperjelas bahwa korea selatan tengah menggunakan kebudayaannya sebagai instrumen dalam berdiplomasi (http://www.ipsk.lipi.go.id/berita/208-indonesia-korea-selatan-sema kin-mantapkan-hubungan-diplomatik diakses pada 2 Oktober 2013).

Kedua, dalam penelitian mengenai Peluang dan Tantangan Diplomasi Budaya Dalam Peningkatan Hubungan Bilateral Indonesia-Turki, Ardiansyah mengungkapkan bahwa Globalisasi dan revolusi teknologi yang terjadi telah membawa konsekuensi langsung pada praktik diplomasi sehingga telah mengubah tatanan dunia. Diplomasi adalah suatu seni untuk mengatur hubungan internasional melalui proses negosiasi yang kemudian diselaraskan oleh *aktor-aktor* negara, juga diasumsikan sebagai aktivitas yang menjaga, mengedepankan serta memajukan asas kepentingan nasional dalam hubungan antar negara lain dengan jalan damai. Beranjak dari tujuan klasik diplomasi yang menekankan pengamanan teritorial kepentingan dan keuntungan maksimum negara itu sendiri kini integritas diplomasi lebih merujuk pada bagaimana adanya pengamanan atas kebebasan berpolitik dengan memperkuat hubungan kerjasama dengan negara sahabat, memelihara

hubungan erat dengan negara yang sehaluan dan dibina melalui proses negosiasi yang bermanfaat (FISIP-UNHAS, 2012:5).

Karakteristik dari diplomasi modern salah satunya dikenal dalam bentuk metode yang memanfaatkan nilai-nilai kebudayaan yang kemudian diistilahkan dengan diplomasi budaya. Meski diklasifikasikan sebagai salah satu komponen *soft Diplomacy*. Delegasi dari aspek kebudayaan dalam era global saat ini sering dimanfaatkan untuk membina hubungan baik dengan negara lain karena pertukaran budaya lebih memungkinkan rakyat masing-masing di setiap negara untuk mengetahui pandangan satu sama lain dengan cara yang jauh lebih baik. Tujuannya adalah untuk memamerkan keagungan kebudayaan suatu negara dan apabila mungkin dapat mempengaruhi pendapat umum negara tertentu. Target yang dapat diperoleh dari media diplomasi budaya ini dapat mengesankan negara lain dengan warisan kebudayaan dan mengekspornya ke bagian dunia lain sehingga memudahkan pembangunan basis yang kuat untuk memperoleh dukungan atas masalah lainnya.

Kebudayaan dianggap sebagai sebuah ekspedisi ke negara lain jauh lebih bermanfaat dan menguntungkan dibandingkan sasaran dengan unsur militer, imprealisme kebudayaan juga dianggap sebagai usaha untuk menaklukkan dan menguasai jiwa manusia serta sebagai sebuah instrumen untuk mengubah hubungan *Power* antara kedua negara menjadi jauh lebih bersahabat. Hal ini yang kemudian melandasi mengapa media diplomasi kebudayaan kerap digunakan untuk meningkatkan hubungan antar negara menjadi jauh lebih diplomatis.

Ardiansyah juga menyimpulkan dalam penelitiannya tersebut bahwa diplomasi budaya adalah sebuah modifikasi pada bentuk dan sebuah koordinasi yang sangat penting dari interaksi bilateral suatu Negara dimana diplomasi budaya merupakan terjemahan dari *Soft Power*.

Ketiga, karya ilmiah yang peneliti dapatkan berjudul "*Pengaruh Soft Diplomacy dalam Membangun Citra Korea Selatan di Indonesia"*. dari Skripsi jurusan Hubungan Internasional UNHAS karya Ayu Riska Wahyudiya. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa alasan Korea menggunakan unsur budayanya dalam berdiplomasi adalah untuk meningkatkan citra yang positif bagi negaranya. Meningkatkan citra positif dari pandangan masyarakat Indonesia terhadap Korea Selatan tentunya dapat membangun citra politik negara itu sendiri. Pembangunan citra juga dapat menimbulkan ketertarikan dan kepercayaan publik negara lain untuk melakukan kerjasama dengan Korea Selatan. Dalam rangka membangun citra global Korea Selatan sebagai tujuan nasional di masa Pemerintahan Presiden Lee Myung Bak dibutuhkan keahlian dan strategi yang benar dan efektif karena citra dapat dihasilkan dari strategi yang komprehensif baik dari sisi isi, pengemasan maupun sasaran yang akan dituju.

Dalam meningkatkan citra bangsa, Korea Selatan memerlukan upaya jangka panjang sehingga harus disertai strategi yang luas dan universal pada hasil yang diinginkan agar tidak dibatasi oleh afiliasi politik. Oleh karena itu, strategi pelaksanaan *soft diplomacy* yang dilakukan secara kompeten didukung oleh kemampuan persuasi, berkomunikasi dan negosiasi melalui bentuk *multitrack diplomacy*. Dari Hasil Wawancara yang dilakukan Ayu Rizka, *First Secretary of*

Republic of Korea Embassy, Mr.Kim Do Hyung menyatakan bahwa ada 4 strategi yang dilakukan sebagai upaya mewujudkan visi Global Korea sebagai pembangunan citra bangsa yang pertama adalah dengan mengembangkan Seni Kebudayaan. Korea Selatan menganggap kebudayaan merupakan unsur paling penting dalam membangun citra suatu bangsa dan interaksinya antara budaya yang berbeda akhirnya dapat mengarah untuk menghargai keanekaragaman antar bangsa. Ketika kepekaan budaya diperoleh, maka perhatian publik dan partisipasi akan secara alami mengikuti. Dengan adanya peran pemerintah dalam mengiringi masuknya suatu budaya asing, menjadikan budaya tersebut menjadi inti dari *Soft Power* dalam berdiplomasi. Kedua adalah mengembangkan sikap profesionalisme. Tidak seperti beberapa negara-negara lain, Korea memiliki kemampuan yang bisa mensukseskan pelaksanaan *Soft Diplomacy* karena aktor negara dan aktor non-negara bekerjasama secara aktif menjadi promotor guna meningkatkan *Soft Power*. Namun upaya koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dan para aktor non-negara profesional perlu diselaraskan agar dapat mencapai tujuan akhir secara maksimal.

Korea Selatan percaya bahwa diplomasi saat ini tidak hanya menjadi tugas diplomat professional semata, namun keterlibatan para pelaku bisnis bersama dengan masyarakat juga memainkan peran penting, dalam hal ini peran para selebritis tentunya dianggap akan lebih menarik karena mereka sudah dikenal oleh masyarakat sehingga berkontribusi untuk meningkatkan hubungan luar negeri Korea Selatan. Oleh karena itu, pelaksanaan strategi dengan mengembangkan sikap profesionalisme melalui keterlibatan para aktor non-negara dalam pelaksanaan *Soft*

Diplomacy juga akan sangat membantu meningkatkan sektor pariwisata yang secara otomatis pengaruhnya dapat meningkatkan sektor perekonomian Korea Selatan.

Peran para selebritis tidak hanya untuk membangun citra Korea dalam menarik kunjungan wisatawan ke Korea melainkan pula sudah mulai dilibatkan dalam peningkatan hubungan di bidang politik dan militer Korea Selatan. Strategi tersebut bertujuan membentuk kesan ataupun citra Korea Selatan sebagai negara yang bersahabat dan kooperatif. Ketiga yaitu dengan memanfaatkan Teknologi Media Komunikasi dan Informasi. Korea Selatan menempatkan teknologi media komunikasi berada pada awal dan akhir proses diplomasi yang mana menjadikan media sebagai satu rangkaian yang tidak terputus dalam proses diplomasi. Hal tersebut dikarenakan diplomasi termasuk proses pengolahan dan pemanfaatan data informasi dalam memperjuangkan kepentingan nasional yang berakhir pada hasil akhir mencapai tujuan nasional. Penggunaan teknologi media komunikasi dan informasi menjadi salah satu strategi penting yang diambil oleh Pemerintah Korea Selatan karena menjadi bagian terintegrasi dari pelaksanaan *soft diplomacy* tersebut. Teknologi media informasi mendorong penyebaran budaya Korea bersama dengan *Hallyu* yang semakin luas dan cepat dari berbagai *mainstream* media.

Dalam bidang politik, kemajuan yang telah dicapai media dapat dikatakan sebagai faktor kunci keberhasilan diplomasi masa kini karena menyebabkan secara efektif terbukanya proses diplomatik bagi aktor-aktor yang berbeda dan mengakhiri diplomasi yang selalu dimonopoli oleh para negarawan dan diplomat. Oleh karena

itu, Pemerintah Korea Selatan menyusun strategi dengan menggunakan jalur diplomasi media untuk memanfaatkan kemajuan industri teknologi informasi dalam mengembangkan kebudayaan Korea. Hal tersebut akan mudah terlaksana mengingat Korea Selatan adalah salah satu negara yang sangat maju dalam perkembangan teknologi informasi, digitalisasi dan memiliki jaringan internet tercepat di dunia. Perkembangan teknologi media massa memungkinkan akses informasi dengan mudah dan biaya rendah dengan memanfaatkan internet tanpa halangan birokratis dan dapat memberikan pengaruh yang lebih cepat dan luas ke seluruh lapisan masyarakat di dunia.

Dari ketiga strategi tersebut, barulah Korea Selatan melakukan Interaksi Kebudayaan Melalui *Hallyu*. Pencitraan berasal dari dalam namun dinilai oleh pihak luar mengenai meningkat atau tidaknya suatu citra. Penilaian atau tanggapan suatu negara ataupun masyarakat tersebut dapat menimbulkan rasa hormat, kesan yang baik dan menguntungkan terhadap pencitraan suatu negara yang mana landasan pencitraan itu biasanya dari nilai-nilai kepercayaan ataupun budaya masyarakat yang terbentuk (Nimmo,2010:4). Bentuk upaya pencitraan diri Korea Selatan itupun diwujudkan melalui budaya popularnya yakni *Hallyu* yang menjadi suatu kegiatan penting dalam persaingan dunia bisnis dan sebagai *soft diplomacy* Korea Selatan yang diimplementasikan dalam pelaksanaan Diplomasi Budaya. Upaya Pemerintah Korea Selatan dalam mengembangkan seni kebudayaan sebagai *soft diplomacy* yang melibatkan sikap profesionalisme aktor non-negara dan didukung penyebarannya melalui media disusun sebagai langkah strategi membangun citra Korea, dilengkapi oleh pilar strategi akhir yakni melalui budaya

Hallyu agar terjadi kontinuitas interaksi kebudayaan. Pengembangan konten budaya Korea yang tidak hanya terkait budaya tradisional tetapi juga budaya populer tentunya diharapkan dapat mensukseskan pelaksanaan *soft diplomacy* Korea Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Mr. Kim dapat disimpulkan bahwa dengan menjalin dan mengharmonisasikan hubungan kerjasama antara aktor negara dan non-negara dapat memperkuat ekspansi budaya *Hallyu* terlaksana sebagai bagian diplomasi secara berkelanjutan. Dalam perkembangan domestik, pemerintah juga melakukan koorporasi yang baik dengan masyarakat sipil untuk pengembangan *Hallyu* yang mana kedepannya juga terjadi hubungan masyarakat lintas negara dalam menyebarkan *Hallyu* itu sendiri. Melalui cara tersebut, ekspansi *Hallyu* dapat terus berkelanjutan dan menyebar secara luas. Pemerintah Korea berusaha untuk membentuk dan mempertahankan *networking* tersebut.

Secara lebih rinci tiga karya ilmiah tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka

Peneliti	**Judul**	**Persamaan**	**Perbedaan**
Triono Akmad Munib	Demam *K-Pop* (Keberhasilan Pemerintah Korea Selatan Membangun Perekonomian Lewat Seni	▪ Membahas mengenai diplomasi budaya sebagai upaya mencapai National Interest ▪ Diplomasi menggunakan Budaya sebagai salah satu bentuk dari fenomena Globalisasi	• Penelitian ini memaparkan keberhasilan upaya pemerintah yang menjadikan kebudayaan sebagai instrumen dalam membangun perekonomian
Peneliti	**Judul**	**Persamaan**	**Perbedaan**
Ardiansyah	Peluang Dan Tantangan Diplomasi Budaya	▪ Membahas mengenai diplomasi budaya sebagai upaya mencapai National Interest	• Objek yang diteliti adalah hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki

	Dalam Peningkatan Hubungan Bilateral Indonesia – Turki	▪ Diplomasi menggunakan Budaya sebagai salah satu bentuk dari fenomena Globalisasi	
Ayu Riska Wahyudiya	Pengaruh *Soft Diplomacy* dalam Membangun Citra Korea Selatan di Indonesia	▪ Membahas mengenai diplomasi budaya sebagai upaya mencapai National Interest ▪ Diplomasi menggunakan Budaya sebagai salah satu bentuk dari fenomena Globalisasi	• Penelitian ini memaparkan upaya *soft diplomacy* korea dalam membangun citra positif guna kepentingannya dalam berpolitik

Selanjutnya, berbeda dengan penelitian-penelitian diatas, dalam penelitian ini akan menguraikan sejauh mana kelanjutan pengaruh *Hallyu* sebagai bagian dari diplomasi Budaya Korea Selatan di Indonesia. Keterlibatan masalah kebudayaan dalam hubungan internasional sering kali diingat sebatas performa kesenian seperti kegiatan kesenian atau pekan kesenian ke negara-negara lain. Jika ditinjau lebih jauh, keterkaitan kebudayaan dalam hubungan internasional dapat dikatakan bahwa masalah hubungan internasional sebagian besar merupakan masalah kebudayaan. Dalam melakukan diplomasi, tentunya politik luar negeri berbeda tergantung kepada nilai dan budaya suatu negara. Maka dari itu peneliti menguraikan bagaimana Korea Selatan melakukan diplomasi budaya di Indonesia dan bagaimana perubahan hubungan Korea Selatan-Indonesia atas diplomasi budaya yang dilakukan Korea Selatan.

Pemahaman kebudayaan dan nilai tentu saja diperlukan untuk mensukseskan suatu perundingan dan kerjasama. Hubungan antara kebudayaan dan hubungan internasional lainnya dapat diutarakan dalam kerangka diplomasi kebudayaan. Dalam hal ini, diplomasi sebagai salah satu kajian hubungan internasional bukan hanya diartikan sebagai negosiasi saja, melainkan juga cara mengelola hubungan

antar bangsa baik dalam keadaan damai atau dalam situasi perang agar tetap menjaga *win-win solution*. Sama halnya dalam kerjasama antara Korea Selatan dan Indonesia.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Internasional

Secara terminologi, Hubungan Internasional adalah sebuah interaksi yang terjadi melintasi batas negara yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu dengan segala kepentingannya dan ada sejumlah kebijakan yang berlaku dalam mengatur hubungan tersebut. Pada awal keberadaannya, pembahasan dan aktor dalam menjalin suatu hubungan dengan negara lain cenderung *high politic* dan tertutup. Hubungan internasional adalah studi mengenai pola-pola aksi dan reaksi di antara negara-negara berdaulat yang diwakili oleh elit-elit pemerintahan (Couloumbis dan Wolfe, 2004 : 24).

Sementara dalam perkembangannya, pola interaksi Hubungan Internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh aktor pemerintah maupun oleh aktor non-pemerintah (Rudy, 2003:2). Dengan seiring perkembangan zaman yang semakin maju dengan berbagai macam teknologi yang diciptakan menyebabkan studi hubungan internasional menjadi semakin kompleks.

Kompleksitas hubungan internasional itu sesuai dengan pendapat Jack C. Plano yang mengatakan bahwa hubungan internasional mencakup hubungan antar negara atau sebagai interaksi para aktor yang tindakan serta kondisinya dapat

menimbulkan konsekuensi terhadap aktor lainnya untuk memberikan tanggapan (Plano, 2000: 115).

Hubungan Internasional yang pada awalnya mengkaji peperangan dan perdamaian kemudian meluas untuk mempelajari perkembangan, perubahan dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antara negara atau antarbangsa dalam konteks sistem global, menjadi kajian Hubungan Internasional yang tidak hanya fokus pada hubungan politik yang berlangsung antar negara, tapi juga mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan negara, inilah kemudian yang disebut dengan Hubungan Internasional kontemporer (Rudy, 2003: 51). Selanjutnya ruang lingkup yang dikaji oleh ilmu Hubungan Internasional menjadi lebih luas dengan mencakup bahan pengkajian mengenai berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah aspek budaya

2.2.2 Hubungan Bilateral

Telah menjadi bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahwa setiap bangsa di dunia ini akan melakukan interaksi antar bangsa yang mana terselenggaranya suatu hubungan internasional baik melalui berbagai kriteria seperti terselengaranya suatu hubungan yang bersifat bilateral, regional, ataupun multilateral hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kusumohamidjojo mengenai hubungan bilateral yakni:

> Suatu bentuk kerjasama diantara negara-negara yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh diseberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik kebudayaan dan struktur ekonomi (Kusumohamidjojo, 2001: 3).

Terselenggaranya hubungan bilateral juga tidak terlepas dan tercapainya beberapa kesepahaman antara dua negara yang melakukan hubungan yang mana mereka mengabdi pada kepentingan nasionalnya dalam usaha untuk menyelenggarakan politik luar negerinya masing-masing. Dengan tujuan nasional yang ingin dicapai suatu bangsa dapat terlihat dan kepentingan nasional yang dirumuskan oleh elit suatu negara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Plano dan Olton bahwa:

> Hubungan kerjasama yang terjadi antara dua negara di dunia ini pada dasarnya tidak terlepas dan kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan nasional merupakan unsur yang sangat vital yang mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer,dan kesejahteraan ekonomi (Plano, 2000: 7).

Dalam hubungan kerjasama yang dijalin antar dua negara diharapakan merupakan hubungan yang saling mengisi kepentingan masing-masing. Adapun upaya kerjasama tersebut tidak mengabaikan hak kedaulatan suatu negara. Hal tersebut sejalan dengan definisi hubungan bilateral menurut Juwondo yakni:

> Hubungan interaksi antar dua negara yang dikembangkan dan dimajukan dengan menghormati hak-hak kedua negara untuk melakukan berbagai kerjasama pada aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan atau mengucilkan keberadaan negara tersebut serta menunjukkan dan memberikan nilai tambahan yang menguntungkan dari hubungan bilateral itu (Juwondo, 2001: 21).

Pelaksanaan hubungan bilateral dilakukan guna meraih *mutual benefit*. Secara ideal kedua negara bekerjasama untuk saling menguntungkan dengan menyelaraskan tujuan nasional dan politik luar negeri masing-masing negara. Hubungan bilateral yang dijalin oleh dua negara tentunya memilki sifat dari sasaran yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan beberapa peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Hal tersebut sepatutnya lebih cenderung pada peluang

keuntungan yang akan diberikan dalam pelaksanaan kerjasama yang dijalin, karena peluang menjadi salah satu faktor sukses atau gagalnya suatu kerjasama.

Pada umumnya hubungan bilateral mengacu pada hubungan politik dan budaya yang melibatkan dua negara (Djelantik, 2008:85). Terkait hal tersebut Kusumohamidjojo menyatakan bahwa "kerjasama lebih mudah dijalin melalui bidang kebudayaan daripada di bidang militer" (Kusumohamidjojo, 2001:92). Korea Selatan memiliki suatu peluang besar dengan mengimplementasikan kebudayaannya melalui musik, film, fashion, dan budaya lainnya sebagai salah satu objek dalam menjalin hubungan kerjasama dengan Indonesia, sehingga dapat menciptakan hubungan yang harmonis antar negara melalui kebudayaan.

Hubungan diplomatik Korea Selatan dengan Indonesia secara resmi dijalin September 1973 dan intensitas hubungan kerjasama meningkat dalam enam tahun terakhir yang tercermin dari semakin bertambahnya ikatan kerjasama antara kedua negara di berbagai bidang mencakup politik, keamanan, ekonomi, perdagangan dan sosial budaya. Korea Selatan menjalin hubungan diplomatik di bidang kebudayaan dengan Indonesia sangat membantu menopang pemasukan sektor ekonomi-perdagangan sekaligus dapat meningkatkan kekuatan politiknya karena Indonesia merupakan bangsa pasar dan negara demokrasi yang besar.

2.2.3 *Soft Power*

Konsep *Soft Power* pertama kali diperkenalkan oleh Joseph S. Nye di tahun 1990. Konsep *power* sendiri menurut Nye adalah kemampuan dalam hal mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan. Terdapat tiga

cara dalam mengeksekusi *power*, yaitu: memaksa lewat ancaman, membujuk dengan memberikan bayaran, atau yang terakhir dengan menarik perhatian atau memikat hati. Dua yang pertama dinamakan *hard power*, yakni ditandai dengan penggunaan kekuatan militer maupun ekonomi, sedangkan yang ketiga disebut dengan *Soft Power*. Nye mendefinisikan *Soft Power* sebagai kemampuan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari orang lain dengan cara memunculkan ketertarikan dibandingkan melakukan paksaan atau bayaran. *Soft Power* ini terletak pada kemampuan suatu pihak dalam membentuk preferensi pihak lain (http://hbswk.hbs.edu/archive/4290.html diakses pada 10 Maret 2014).

Soft power bersumber dari aset-aset yang dapat digunakan untuk memproduksi daya tarik. Nye menjabarkan bahwa *soft power* suatu negara utamanya didasarkan pada tiga sumber, yaitu kebudayaan (*culture)*, yang membuat negara tersebut menarik bagi pihak lain, nilai politik (*political values),* yang dianut negara tersebut di dalam maupun luar negeri dan kebijakan luar negeri (*foreign policies*), yang membuat negara memiliki legitimasi dan otoritas moral) (Nye, 2004: 96). Kebudayaan sebagai salah satu sumber utama *soft power* dibagi lagi menjadi dua jenis, yakni *high culture*, seperti seni, literatur, dan pendidikan yang menarik perhatian elit tertentu serta *pop culture*, yang berfokus pada produksi hiburan massal. *Soft power* adalah *attractive power* (kekuatan daya tarik) yang hanya dapat dihasilkan apabila sumber-sumber yang dimobilisasi melalui diplomasi publik memiliki daya tarik yang cukup atraktif untuk mempengaruhi preferensi target atau penerima *soft power* yang dituju. Oleh karena itu, dalam pembentukan *soft power*, selain mengidentifikasi sumbernya perlu diidentifikasi pula faktor-

faktor apa yang dapat membuat sumber-sumber *soft power* tersebut menarik dan dapat diterima oleh penerima *soft power.*

Aktor-aktor yang terlibat dalam pembentukan *soft power* diistilahkan sebagai "*referees"* dan "*receivers" soft power*. "*Referees" soft power* terkait dengan pihak yang menjadi sumber rujukan legitimasi dan kredibilitas *soft power* sedangkan "*receivers" soft power* adalah target yang dituju sebagai sasaran penerima *soft power* (Nye, 2008:107). Hubungan antara sumber *soft power* dengan *referees* dan *recievers soft power* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Sumber, Rujukan dan Target *Soft Power*

Sumber *Soft Power*	***Referees/*rujukan untuk kredibilitas dan legitimasi *Soft Power***	***Recievers/*Penerima *Soft Power***
Kebijakan luar negeri	Pemerintah, media, organisasi non-pemerintah, (*Nongovernmental Organizations*/NGOs), organisasi antar-pemerintah (*Intergovernmental Organizations*/IGOs)	Pemerintah dan publik/masyarakat negara lain
Nilai-nilai dan kebijakan domestik	Media, NGOs, IGOs	Pemerintah dan publik/masyarakat negara lain
High culture	Pemerintah, NGOs, IGOs	Pemerintah dan publik/masyarakat negara lain
Pop culture	Media, pasar (*markets*)	Publik/masyarakat negara lain

(Sumber: Nye, J.S. (2008), 'Public *Diplomacy* and *Soft Power*', *THE ANNALS of the American Academy of Political and Social Science:* hlm 94-109).

Mempromosikan citra positif suatu negara bukanlah sesuatu yang baru. Namun di era sekarang, kondisi untuk merancang sebuah *Soft Power* telah mengalami transformasi, begitu juga dengan konteks internasional yang telah berubah dengan revolusi informasi dan globalisasinya. Di sisi lain, hal ini juga meningkatkan kemampuan Korea Selatan dalam merancang *Soft Powernya*. Korea

Selatan adalah negara yang dikaruniai banyak *Soft Power* yang potensial dan salah satu tugas diplomasi publik adalah mendayagunakan potensi tersebut dengan merancangnya agar dapat membantu Korea Selatan dalam mencapai kepentingan nasionalnya di Indonesia. Nye berargumen bahwa konteks sangat menentukan dampak dan hasil suatu *Soft Power*, terlepas dan sumber mana *Soft Power* tersebut berasal dan memang dibandingkan dengan *hard power*, *Soft Power* lebih banyak bergantung pada konteks, dan terhadap adanya kemauan dari sang penerima. Oleh karenanya, *Soft Power* tidaklah konstan, namun sesuatu yang dapat berubah-ubah berdasarkan waktu, tempat, dan kondisi.

2.2.4 Diplomasi

2.2.4.1 Diplomasi Publik

Implementasi dari diplomasi publik yang dilakukan oleh sebuah negara tentunya berbeda-beda. Bagi negara-negara di Asia upaya untuk mengimplementasikan diplomasi publik ini dilakukan dengan instrumen-instrumen kebudayaan untuk menarik perhatian serta secara tidak langsung menyebarkan pengaruh budaya negara tersebut agar diikuti oleh masyarakat dinegara lain, khususnya budaya-budaya populer yang berkembang di negara tersebut.

Diplomasi Publik merupakan kunci dalam implementasi apa yang disebut dengan *Soft Diplomacy* menjadi alat utama diplomasi sekarang ini. Perkembangan diplomasi di era globalisasi menjadikan Diplomasi Publik itu sendiri semakin beragam. Kecenderungan pelaksanaan Diplomasi Publik dengan menggunakan aplikasi *Soft Diplomacy* dianggap efektif dan efisien karena mudah untuk dilakukan

tanpa menelan korban dan menghabiskan biaya besar. Seiring berubahnya paradigma aktor hubungan internasional, pelaksanaan Diplomasi Publik melibatkan berbagai kalangan aktor non-Pemerintahan. Oleh karena itu, *Soft Diplomacy* merupakan bentuk nyata dari penggunaan instrumen selain tekanan politik, militer dan tekanan ekonomi salah satunya yakni dengan mengedepankan unsur budaya dalam kegiatan diplomasi. Maka dari itu, konsep politik luar negeri dilakukan melalui diplomasi publik, seperti apa yang di lakukan oleh Korea Selatan (Yudhantara, 2011:183).

Dalam kaitannya dengan penelitian ini Korea Selatan mengedepankan diplomasi publik sebagai alat utama dalam *soft diplomacy*nya kepada Indonesia. Strategi tersebut merupakan upaya Korea Selatan untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia dibidang pariwisata dan kebudayaan sekaligus menjadi batu loncatan untuk menjalin kerja sama dibidang lainnya dengan Indonesia seperti ekonomi dan politik.

2.2.4.2 Diplomasi Budaya

Diplomasi menurut Geoff Berridge dan Alan James adalah penyelenggaraan hubungan antara negara-negara yang berdaulat melalui diplomat untuk mempromosikan negosiasi internasional (Berridge dan James, 2012: 69). Secara konvensional, pengertian diplomasi adalah usaha suatu negara dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasionalnya di dunia internasional (Roy,2006:9). Sedangkan definisi diplomasi budaya adalah sebagai sebuah pertukaran ide, informasi, seni, serta aspek kebudayaan lainnya dengan tujuan untuk menjaga sikap

saling pengertian antara satu negara dengan negara lain maupun antar masyarakatnya (Cummings, 2003:1).

Pendapat lain dari Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari dalam bukunya yang berjudul Diplomasi Kebudayaan; Konsep dan Relevansi Bagi Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia. Warsito dan Kartikasari mendefinisikan diplomasi budaya sebagai hasil atau upaya budi daya manusia yang biasanya termanifestasi dalam pendidikan, kesenian, ilmu pengetahuan, olah raga, dan lain-lain.

Kegiatan yang dilakukan untuk tujuan diplomasi kebudayaan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat, individu-individu, termasuk warga negara. Lebih lanjut Warsito dan Kartikasari mengelompokkan diplomasi kebudayaan menjadi dua, yaitu diplomasi kebudayaan makro dan diplomasi kebudayaan mikro .

Secara umum kebudayaan makro yang diungkapkan oleh Warsito dan Kartikasari adalah segala hasil dan upaya budidaya manusia terhadap lingkungan, sehingga dapat diartikan kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang kemudian dapat dipelajari untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Sedangkan diplomasi kebudayaan mikro merupakan hasil dari diplomasi kebudayaan makro, berupa pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga dan kesenian (Warsito dan Kartikasari, 2007:2-19). Terdapat beberapa tujuan dari diplomasi kebudayaan yaitu:

1. Tujuan diplomasi kebudayaan lebih luas dari pada pertukaran kebudayaan, misalnya mengirim utusan ke luar negeri untuk memperkenalkan kebudayaan satu negara ke negara lain.
2. Membangun pengetahuan baru dan kepekaan terhadap negara lain untuk mewujudkan hubungan yang lebih baik antara masyarakat dengan bangsanya.
3. Mempengaruhi pendapat masyarakat negara lain guna mendukung suatu kebijakan luar negeri tertentu.

Diplomasi budaya tergolong dalam bahasan *Soft Power* sebagai suatu kekuatan politik yang dipengaruhi budaya, nilai, ide sebagai sisi lain dari *hard power* yang menggunakan kekuatan militer.

Terdapat tiga kriteria mengapa diplomasi budaya menjadi nilai penting dalam teori hubungan internasional. Pertama, untuk mengurangi intensitas kekuatan militer pasca perang dingin, budaya dipandang sebagai sebuah bentuk kekuatan baru dalam hubungan internasional.

Kedua, setiap Negara bangsa juga harus membangun dasar dan batas jaringan nonsekuritas dalam hal mempertahankan identitas bangsa. Budaya yang terdiri dari berbagai aspek menjadi identitas suatu Negara di mata internasional.

Ketiga, diplomasi budaya juga bisa menjadi alasan kuat dalam hal membentuk sebuah sistem internasional baru, baik berupa organisasi regional maupun global.

2.2.4.3 *Multitrack Diplomacy*

Semakin dinamisnya aktivitas hubungan internasional berpengaruh pada aktivitas diplomasi yang menunjukkan peningkatan peran yang signifikan juga. Aktivitas diplomasi yang dimaksud adalah proses politik untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu Pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan dan sikap Pemerintah negara lain (Suryokusumo, 2004:1). Kini diplomasi juga tidak hanya menyangkut kegiatan politik saja tapi juga bersifat multi-dimensional yang menyangkut aspek sosial-budaya, hak asasi manusia, ekonomi, dan lingkungan hidup yang digunakan di situasi apapun dalam hubungan antar bangsa untuk menciptakan perdamaian dalam peraturan politik global serta mencapai kepentingan nasional suatu Negara. Oleh karena itu, pemerintah sekarang ini bukanlah aktor tunggal dalam menjalin hubungan internasional. Masyarakat, media, dan pebisnis telah menjadi aktor yang juga dapat mempengaruhi hubungan dengan negara lain.

Multitrack Diplomacy merupakan perluasan dari *first track* dan *second track diplomacy*. Paradigma yang telah mendefinisikan bidang resolusi konflik selama dekade terakhir. *Multitrack diplomacy* berasal dari ketidak efisienan mediasi pemerintah. Selain itu, peningkatan konflik dalam negara pada 1990-an menegaskan bahwa *First track Diplomacy* bukanlah metode yang selalu efektif untuk mengamankan kerjasama internasional atau menyelesaikan konflik. Sebaliknya, perlu ada pendekatan yang lebih pribadi selain mediasi pemerintah. Untuk itu, mantan diplomat Joseph Montville menciptakan *Second Track*

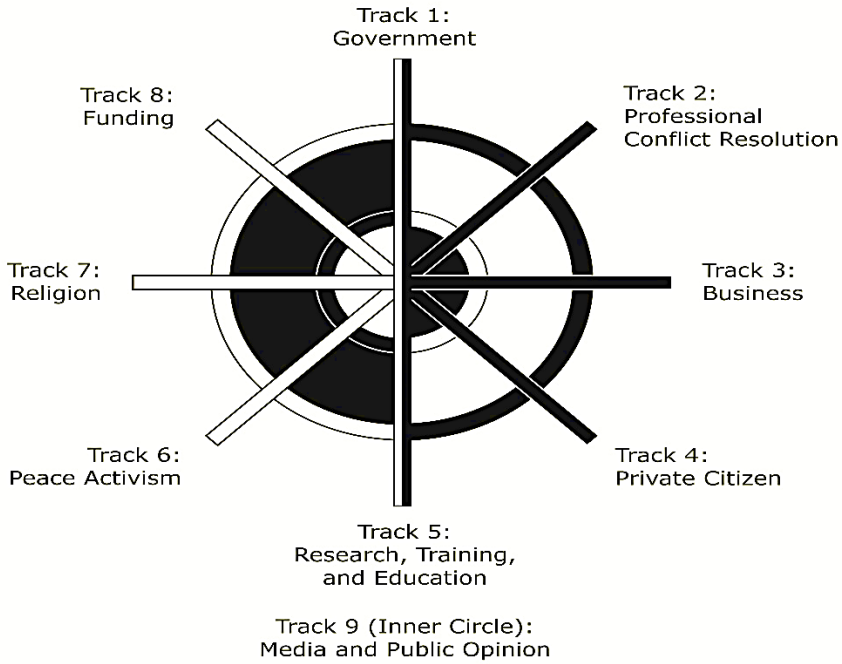
Diplomacy dalam rangka untuk melibatkan warga negara dengan keragaman dan keterampilan dalam proses mediasi.

Namun, Dr. Louise Diamond, mengakui bahwa mengelompokan kegiatan kedua *Track* di bawah satu label tidak dapat menangkap kompleksitas atau luasnya diplomasi secara resmi. Oleh karena itu, ia menciptakan istilah *multitrack diplomacy*, untuk menggabungkan semua aspek mediasi dari pekerjaan tanah-tingkat warga negara untuk pertemuan tingkat atas dari kepala negara. *MultiTrack Diplomacy* memanfaatkan semua lapisan masyarakat untuk menentukan kebutuhan dan memfasilitasi komunikasi antara semua lapisan masyarakat. Duta Besar John McDonald menambahkan lebih lanjut *track* dengan memperluas Dua *track* Diplomasi menjadi empat *track* yang terpisah: profesional resolusi konflik, bisnis, warga negara, dan media.

Pada tahun 1991, Dr. Diamond dan Duta McDonald memperluas jumlah *track* menjadi sembilan yaitu Pemerintah atau Perdamaian melalui Diplomasi, Nonpemerintah / profesional atau Perdamaian melalui Resolusi Konflik, Bisnis atau Perdamaian melalui *Commerce*, masyarakat atau Perdamaian melalui Keterlibatan Personal, Penelitian, Pelatihan, dan Pendidikan atau Perdamaian melalui Pembelajaran, Aktivisme atau Perdamaian melalui Advokasi, Agama atau Perdamaian melalui *Faith in Action*, Pendanaan atau Perdamaian melalui Memberikan Sumber Daya, Komunikasi dan Media atau Perdamaian melalui Informasi.

Kemudian Dr. Diamond dan Duta McDonald reorganisasi hubungan antara berbagai *track*. Alih-alih menempatkan *track* satu di bagian atas hirarki, dengan

semua *track* mengikuti arah satu jalur, Diamond dan McDonald mendesain ulang diagram dan menempatkan *track* dalam lingkaran yang saling berhubungan. Tidak ada satu *track* yang lebih penting dari pada yang lain, dan tidak ada satu *track* independen dari yang lain. Setiap *track* memiliki sumber daya sendiri, nilai-nilai, dan pendekatan, tapi karena mereka semua terkait, mereka dapat beroperasi lebih kuat ketika mereka dikoordinasikan.



(Sumber: Louise Diamond and John McDonald. 2003 *Multitrack Diplomacy*; A Systems Approach to Peace Third Edition. Kumarian Pres.Hal. 15)

Gambar 2.1: Sembilan *Multitrack Diplomacy*

pelaksanaan *multitrack diplomacy* didasarkan pada kesadaran dan keinginan aktor non-negara secara umum dari berbagai kalangan yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda untuk melakukan usaha menciptakan *peacemaking* dan *peacebuilding*. Menyikapi bermunculannya aktor-aktor non-negara yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan politik luar negeri suatu negara

diharapkan bisa memberi kontribusi yang positif bagi pencapaian kepentingan nasional khususnya dalam membangun citra bangsa yang positif di mata dunia internasional serta dalam mengisi dan mengembangkan kerjasama di berbagai bidang dan mengatasi permasalahan global.

Multitrack diplomacy telah menjadikan diplomasi bukan hanya tugas diplomat professional ataupun Pemerintah dalam pengertian umum, namun merupakan sebuah upaya untuk merangkul dan melibatkan masyarakat dari berbagai negara dalam suatu hubungan yang harmonis guna mewujudkan persahabatan bangsa-bangsa menuju perdamaian dunia. Selain itu pula, di era globalisasi hubungan antar negara yang terjalin kini semakin dimudahkan karena ke delapan *track* disatukan oleh memanfaatkan kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi.

Berkembangnya peran aktor non-negara dalam hubungan internasional juga disadari oleh Pemerintah Korea Selatan, sehingga dalam *platform* pelaksanaan *soft diplomacy* Korea Selatan, aktor negara dan aktor non-negara bekerja sama saling mendukung dalam memperluas jaringan Korea di dunia melalui pengembangan budaya popular *Hallyu* untuk meningkatkan citra bangsa dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Track pertama ialah pemerintah, dimana pembuat kebijakan dan pembangunan perdamaian dilakukan dengan proses diplomasi resmi melalui aspek-aspek formal dari pemerintah (Diamond dan McDonald, 2003 : 16). Sebagai contoh proses diplomasi yang dilakukan oleh Korea Selatan kepada Indonesia dibidang kebudayaan. Kelebihan di jalur ini ialah keabsahan kebijakan yang tidak dapat

diragukan kerena pemerintahan merupakan institusi formal yang memegang peranan penting dalam sebuah negara. Akan tetapi kekurangannya ialah sifat elit nya yang berpotensi kearah penyalahgunaan kekuasaan karena mereka memiliki wewenang untuk menciptakan aturan.

Track kedua ialah non pemerintah atau professional. Dimana pada jalur ini seorang professional non-pemerintah mampu melakukan aktivitas diplomasi, menganalisa, mencegah, serta menyelesaikan suatu konflik yang bersifat internasional dengan cara komunikasi, pemahaman, dan membangun hubungan baik untuk menghadapinya secara bersama-sama (Diamond dan McDonald, 2003 : 16). Aktor-aktor disini tentu memiliki potensi yang besar untuk menciptakan perdamaian dengan cara tanpa adanya intervensi dari pemerintah. Kelebihan pada jalur ini ialah dapat menunjukan isu yang dihadapi dengan jelas serta mampu mencari jalan alternatif dan improvisasi dalam pemecahan masalah yang mungkin saja tidak terjangkau oleh pemerintah. Namun kekurangannya ialah pencapaian konsensus membutuhkan waktu yang lama dan tidak memiliki ikatan hukum karena terbatasnya legitimasi yang dimiliki oleh seorang aktor tesebut.

Track ketiga ialah melalui bisnis. Dimana dalam menciptakan perdamaian, pada jalur ini menggunakan perdagangan yang juga dapat membawa keuntungan. Bisnis menjadi lahan yang potensial untuk mencapai suatu *peacebuilding* melalui aspek ekonomi. Tidak hanya itu, hubungan persahabatan dan pemahaman internasional melalui kesepakatan tersebut, tentu saja dapat menciptakan simbiosis mutualisme diantara kedua negara sehingga terjadinya suatu konflik di kedua negara tersebut dapat terhindarkan melalui kerjasama yang dilakukan (Diamond

dan McDonald, 2003 : 16). Kelebihan pada jalur ini ialah sektor perdagangan yang dinilai potensial dalam membangun perdamaian dan tentu saja keuntungannya yang akan terus mengalami perkembangan yang pesat. Akan tetapi kekurangannya ialah adanya kesempatan untuk memanfaatkan kerjasama melalui bisnis ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Track keempat ialah warga negara. Dalam jalur ini pencapaian perdamaian dilakukan oleh warga negara atau personal yang berkontribusi dalam kegiatan pembangunan dan perdamaian (Diamond dan McDonald, 2003 : 16). Pada jalur ini biasanya dilakukan dengan diplomasi yang dilakukan seorang warga negara melalui program pertukaran, relawan suatu organisasi baik organisasi pemerintah ataupun independen, dan berbagai kelompok kepentingan. Biasanya aktivitas pada jalur ini tidak terlihat oleh publik dan hanya melalui pemahaman saja perncapaian perdamaian dapat dilakukan. Sebagai contoh pertukaran pelajar yang ditawarkan institusi tertentu dengan berbagai misi baik sosial budaya, ekonomi, ataupun misi lainnya yang bermanfaat tidak hanya untuk negara asalnya tetapi juga negara tujuannya. Kelebihan dari jalur ini adalah adanya kebebasan untuk mengadakan kegiatan yang positif ataupun dengan tujuan perdamaian dan tanpa intervensi dari pemerintah. Kekurangan nya ialah karena cenderung individual, maka dalam menilai sesuatu hanya dilihat dari sudut pandang sendiri yang subjektif.

Track Kelima ialah Penelitian, Pelatihan, dan Pendidikan. Dalam jalur ini, menekankan pada proses melakukan aktivitas diplomasi dengan pembelajaran yang kajiannya meliputi penelitian dan pelatihan dan bekerjasama dengan institusi-institusi (Diamond dan McDonald, 2003 : 16), seperti universitas atau sekolah

seperti melakukan penelitian, studi banding, dan pertukaran pelajar, serta pusat penelitian kelompok yang berkepentingan khusus dimana dalam hal ini memiliki banyak aktivitas mempelajari mengenai situasi di negara lain. Selain itu kegiatan yang dilakukan melalui seminar dan *workshop* dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengeksplor suatu masalah. Sebagai contoh, adalah program-program beasiswa yang dilakukan korea selatan bekerjasama dengan Indonesia. Berharap dengan adanya beasiswa ataupun pertukaran pelajar Korea Selatan dan Indonesia dapat saling memahami budaya masing masing dan mendekatkan hubungan. Kelebihannya adalah jalur ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan informasi secara konkrit karena melakukan penelitian dengan analisa dan praktek terlebih dahulu. Tetapi kelemahannya ialah adanya kesempatan untuk menyalahgunakan atau memanipulasi data informasi. Dalam jalur ini pendidikan ditekankan sebagai suatu peranan yang penting untuk memperbaiki generasi mendatang.

Track keenam ialah aktivisme, merupakan pergerakan massa yang membawa pencerahan, perlawanan kepada aksi politik (Diamond dan McDonald, 2003 : 16). Dalam kacamata upaya perdamaian dunia, jalur ini lebih menekankan pada aktivitas dalam membela HAM, lingkungan hidup, dan keadilan sosial ekonomi serta advokasi terhadap kepentingan khusus. Aktivitas tersebut diwujudkan dalam bentuk protes, dukungan, advokasi, pendidikan, dan pengawasan. Jalur ini juga dapat diartikan kelanjutan dari warga negara, yaitu dimana masing-masing warga bergabung membentuk suatu kelompok atas dasar kesamaan dalam kesepahaman suatu hal dan menjadi aktivis. Kelebihan pada jalur ini dapat mempelajari elit politik yang membuat aturan dan memiliki *power* untuk mengawasi karena aktivis

biasanya membawa nama kelompok masyarakat. Kekurangannya ialah banyak perbedaan pendapat, tentu saja masing masing aksi didasarkan pada kepentingan massa tersebut dan terkadang dalam melakukan aksinya massa menghasilkan konflik dengan massa lain dan tercipta suatu konflik pro dan kontra.

Track ketujuh ialah agama. Mencerminkan perwujudan kerjasama melalui kekuatan kepercayaan (Diamond dan McDonald, 2003 : 16). Pada jalur ini biasanya dilakukan kegiatan yang berorientasi pada perdamaian dan dilakukan oleh kelompok-kelompok spiritual, religius, dan anti kekerasan. Contohnya antara Korea Selatan dan Indonesia yang sama sama memiliki kemajemukan dalam beragama tapi tetap saling menghormati keyakinan masing-masing. Masyarakat Indonesia di Korea Selatan tetap difasilitasi kebutuhan spiritualnya dan begitupun sebaliknya. Kelebihannya ialah jika melihat dari sudut pandang agama, rasa kepekaan yang tinggi akan muncul untuk menciptakan perdamaian dan menentang aksi-aksi yang mengarah kepada kekerasan. Kekurangannya adalah dominasi suatu kepercayaan tertentu bisa saja komunitas lainnya dianggap sebelah mata.

Track kedelapan, ialah pendanaan. Terkait dengan perwujudan perdamaian melalui pendanaan oleh komunitas tertentu yang mampu memberikan dukungan finansial (Diamond dan McDonald, 2003 : 16). Kelebihannya tentu saja dapat memperlancar proses diplomasi sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan diplomasi tanpa adanya hambatan finansial serta dapat memunculkan potensi-potensi terpendam. Namun kekurangannya ialah terkadang muncul manipulasi kekuasaan atau kepentingan pemberi dana untuk alasan ideologi dan peluang sehingga terjadi penyalahgunaan bantuan finansial tersebut.

Track kesembilan ialah komunikasi dan media. Pada jalur ini seluruh jalur dibantu dengan informasi yang didapat dengan memanfaatkan media yang ada baik elektonik, cetak, ataupun lainnya (Diamond dan McDonald, 2003 : 16). Penyebaran informasi dapat menjadi sarana edukasi bagi semua pihak di semua jalur dan menjadi pondasi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kelebihannya dengan adanya kemajuan teknologi, masyarakat dapat dengan mudah dan cepat mendapat informasi dan membuat opini secara objektif. Kekurangannya terletak kepada penyalahgunaan pemanfaatan teknologi media tersebut yang dapat menghasilkan kebohongan publik.

Pelaksanaan *multitrack diplomacy* didasarkan pada kesadaran dan keinginan aktor non-negara secara umum dari berbagai kalangan yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda untuk melakukan usaha menciptakan *peacemaking* dan *peacebuilding* dalam diplomasi. Menyikapi munculnya aktor-aktor diluar pemerintah diharapkan dapat memberi kontribusi yang positif bagi pencapaian kepentingan nasional serta dalam mengisi dan mengembangkan kerjasama di berbagai bidang dan mengatasi permasalahan global.

Seluruh jalur dalam pola hubungan *multitrack diplomacy* memperlihatkan hubungan antar semua jalur pada tingkat yang sama. Setiap jalur memiliki sumber daya, nilai dan pendekatannya masing-masing namun saling mempengaruhi satu sama lain. *Multitrack diplomacy* juga identik sebagai diplomasi publik yang merupakan bentuk diplomasi dalam menjembatani antara dinamika kepentingan nasional di percaturan politik dunia dan aspirasi masyarakat domestik. Pemerintah Korea Selatan melalui *Ministry of Foreign Affairs and Trade* (MOFAT)

menetapkan tahun 2010 sebagai awal mula dalam mempromosikan diplomasi Publik dan mendirikan *Korean Diplomacy Public Forum* serta bekerjasama dengan *Korean Foundation* (MOFAT, 2011: 269). Diplomasi publik merupakan implementasi dari *track* two *diplomacy*. Isu utama diplomasi publik adalah arus transnasional dan ide-ide kepentingan nasional dipromosikan dengan berbagai upaya untuk menyebarkan informasi Saling pengertian dan mempengaruhi masyarakat asing (Djelantik, 2008: 19).

Bentuk *Multitrack diplomacy* sebagai bentuk diplomasi yang baru dengan bermunculannya berbagai aktor non-negara di era globalisasi yang didukung oleh inovasi teknologi diyakini dapat lebih berpengaruh dalam melakukan negosiasi untuk mencapai kepentingan nasional suatu bangsa. Penerapan *multitrack diplomacy* akan semakin mendorong jaringan kerjasama suatu negara dengan negara lain karena komponen para aktor dalam *multitrack diplomacy* menempati posisi berbeda tetapi terkait satu sama lain dan saling berinteraksi untuk membangun kerjasama yang strategis, terlebih lagi media semakin bisa membentuk opini publik secara efektif yang dapat mempengaruhi tindakan Pemerintah mengambil kebijakan melalui apa yang ditampilkan dalam berita melalui media cetak, media elektronik dan tentunya media online.

2.2.5 Kebudayaan dalam Kajian Hubungan Internasional

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat,

bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dapat dipelajari.

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J.Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah *Cultural-Determinism.* Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut *Superorganic*. Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lainyang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang menjadi ciri khas suatu masyarakat (Eppink, 2013: 3).

Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Sedangkan menurut Koentjaranigrat, kebudayaan dapat diartikan sebagai:

> seluruh total dari hasil pikiran, cipta, dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya dan yang karena itu hanya bias dicetuskan oleh manusia sesudah proses belajar. Kebudayaan dalam dimensi ini mencakup hampir seluruh aktivitas manusia dalam kehidupannya (Koentjaraningrat. 2002: 17).

Kemudian pada tanggal 26 Juli hingga 6 Agustus 1982 telah diadakan *World Conference on Cultural Policies* di Mexico City yang disponsori oleh UNESCO . Konferensi ini menghasilkan suatu kesepakatan bahwa :

> kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat (http://www.culturalrights.net/en/documentos.php?c=18&p=190 diakses pada 30/09/2013).

Untuk melihat bagaimana sesungguhnya kebudayaan itu, maka dapat dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam kebudayaan itu sendiri. Ada beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan mengenai komponen atau unsur kebudayaan, antara lain sebagai berikut:

1. Melville J. Herskovits menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu: alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik.
2. Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok yang meliputi:
    a. Sistem norma sosial yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya.
    b. Organisasi ekonomi
    c. Alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan (keluarga adalah lembaga pendidikan utama)
    d. Organisasi kekuatan (politik) (Koentjaraningrat, 2002:13).

Dengan berkembangnya sektor kebudayaan dan kepariwisataan maka, dengan sendirinya akan mendorong terwujudnya pencapaian perluasan kesempatan

kerja, peningkatan kualitas angkatan kerja, revitalisasi institusi ekonomi serta peningkatan produk dan stabilitas harga produk ekonomi rakyat. Di samping itu pembangunan bidang ini akan meletakkan dasar kuat bagi terbentuknya jati diri dan karakter bangsa. Hal ini penting untuk disadari karena di era globalisasi ini setiap negara berlomba mendapatkan kedudukan di tingkat internasional.

Fenomena *Hallyu* yang terjadi di indonesia merupakan suatu bentuk dari Globalisasi dimana Masyarakat, dibantu dengan media teknologi informasi, dapat dengan mudah bertukar atau mempelajari budaya negara lain. Pemerintah Korea Selatan yang jeli akan globalisasi memanfaatkan budaya yang mereka miliki sebagai instrumen dalam berdiplomasi yang disebut diplomasi budaya. Selanjutnya diplomasi budaya korea selatan di indonesia dilakukan dalam kancah hubungan Bilateral dengan dibantu oleh berbagai aktor di kedua negara tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan bilateral yang terjalin sebelumnya.